

## MODELLING ANALISIS STANDAR BELANJA TERHADAP KEBIJAKAN PIMPINAN DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KABUPATEN WAJO)

Rasyidah Nadir<sup>1)</sup>, Muhammad Ridwan Arif<sup>1)</sup>, Fatmawati<sup>1)</sup>, Sabri Wahab<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang

<sup>2)</sup>Pegawai Negeri Sipil Pemda Wajo

### ABSTRACT

This study aims to compile a model of Expenditure Analysis Standard (ASB) due to the policy of regional leaders in the local government of Wajo district. Expenditure Analysis Standard is an instrument for assessing the fairness of workload and costs for an activity organized by the local government. The data used in this study are secondary data sourced from the 2017 Budget Implementation List (DPA), 2017 Budget Realization Data from all SKPDs to the local government, and Price Unit Standard Data based on Regional Regulations (Perda). Data analysis method uses Expenditure Analysis Standard with linear regression model approach. The ASB model is carried out through three stages of preparation, namely the data collection stage, the activity equalization stage, and the model building stage. The research method was carried out by using two approaches namely library research (library research) and field research (field research). The results showed that the ASB model for the preparation of reports without spending honorarium was Rp. 985,770,649 + (Rp. 316,929.96 x number of documents x number of people). As for the average amount of expenditure, maximum expenditure and minimum expenditure for this activity is Rp12.620.594, Rp 30.432.350, and Rp 0,-.

**Keywords:** *Expenditure Analysis Standard, Budget Implementation List, Linear Regression*

### 1. PENDAHULUAN

Penelitian terdahulu yang mengkaji penerapan ASB belum banyak dilakukan sementara pemerintah daerah dalam mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja perlu melengkapi instrumen analisis standar belanja dalam penyusunan anggaran. Penelitian mengenai evaluasi, implementasi model ASB telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti Putra (2012) mengevaluasi penganggaran daerah dengan analisis ASB di Kabupaten Ngawi, penelitian Fatikhah (2013) membuat model ASB pemerintah kota Batu, dan penelitian Amaliah (2015) membuat model ASB pada pemerintah kabupaten Bulukumba. Atas dasar penelitian terdahulu maka peneliti melakukan penelitian mengenai pembuatan model analisis standar belanja pada beberapa kegiatan yang sama di SKPD pemerintah daerah kabupaten Wajo. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran apakah beberapa kegiatan yang sama pada SKPD di pemerintah daerah kabupaten Wajo telah memenuhi kewajiban anggaran belanja dan pengalokasian anggaran yang dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penetapan belanja dan pengalokasian anggaran pada setiap unit kerja secara ekonomis, efisien dan efektif (*value for money*), akuntabel, dan transparan agar dapat dijadikan acuan untuk menilai keadilan dan kewajiban anggaran belanja antar program dan kegiatan yang sama di SKPD sehingga akan dibentuk suatu model kajian Analisis Standar Belanja yang sesuai dengan karakteristik pelaksanaan kegiatan/program di pemerintah daerah kabupaten Wajo.

Penyusunan ASB sangat penting dilakukan pada pemerintah daerah termasuk pemerintah daerah kabupaten wajo karena dalam penganggaran keuangan daerah sering ditemukan berbagai masalah yaitu: (1) kesulitan untuk menilai kewajiban beban kerja atas suatu kegiatan sejenis antar program/kegiatan dan antar SKPD; (2) dalam proses penyusunan dan penentuan anggaran menjadi suatu hal yang bersifat subjektif; (3) adanya ketidakadilan dalam mengalokasikan besaran anggaran untuk dua atau lebih kegiatan yang sama; (4) aparat pemerintah daerah tidak memiliki argumen yang kuat jika “dituduh” melakukan pemborosan, dan (5) proses penyusunan anggaran sering kali tertunda dan membutuhkan waktu yang lama. Hal-hal tersebut menjadikan konsep ASB sangat penting diterapkan dalam pemerintah daerah.

Target temuan dalam penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam bentuk pembuatan model analisis standar belanja pada pemerintah daerah kabupaten Wajo. Model analisis standar belanja oleh pemerintah daerah setempat dapat digunakan pada proses penyusunan APBD sebagai suatu instrumen dalam menilai kewajiban anggaran beberapa kegiatan yang sama pada setiap SKPD, dan diharapkan dengan model

<sup>1</sup> Korespondensi penulis: Rasyidah Nadir, Telp 081355152504, rasyidah\_nadir@yahoo.co.id

analisis belanja yang akan dibuat dapat dijadikan suatu acuan dalam kebijakan penyusunan anggaran pemerintah daerah kabupaten Wajo.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kajian analisis standar belanja pemerintah kota Batu (Fatikhah, 2012) yang menunjukkan bahwa penggunaan ASB pada pemerintah kota Batu dapat menentukan kewajaran belanja, meminimalisasi terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang mengakibatkan inefisiensi anggaran, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas, dan unit kerja mendapat keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri.

Putra (2012) dalam penelitiannya mengenai Evaluasi Penganggaran Keuangan Daerah dengan Analisis Standar Belanja Tahun anggaran 2010 (studi kasus: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Ngawi) menghasilkan model regresi linier sederhana dengan ASB, menghitung nilai minimum dan maksimum anggaran belanja, serta menghitung prosentase alokasi belanja pada masing-masing objek belanja. Berdasarkan prosentase alokasi belanja diketahui bahwa kegiatan koordinasi di Badan Perencanaan Pembangunan kabupaten Ngawi, diketahui 40% pelaksanaan anggaran keuangannya dalam kondisi *underfinance*, 20% wajar dan 40% *overfinance*.

Oktaria (2012) dalam penelitiannya mengenai analisis kendala-kendala penerapan ASB (Studi kasus pada kabupaten Katingan-Kalimantan Tengah) menunjukkan hasil bahwa analisis standar belanja yang telah disusun ternyata sudah tidak relevan lagi untuk dipergunakan dalam praktek penganggaran di kabupaten Katingan. Hal ini terlihat dari uji-t berpasangan (*paired sample t-test*) yang dilakukan mendapatkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara anggaran yang dihitung tanpa dan dengan menggunakan ASB. Faktor yang menyebabkan hal itu antara lain adalah karena perubahan kebijakan belanja yang terjadi di tahun anggaran berikutnya yang tidak dapat diakomodir oleh ASB yang telah ada. Selain itu juga perilaku anggaran di kabupaten Katingan dinilai masih belum mampu menerapkan anggaran berbasis kinerja. Oleh sebab itu, selain diperlukan revisi terhadap rumusan ASB yang ada, juga diperlukan perubahan perilaku anggaran yang mendukung terciptanya anggaran berbasis kinerja.

Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa kebutuhan anggaran berdasarkan pengembangan analisis standar belanja dari dua belas jenis kegiatan bimbingan teknis kabupaten Kuningan tahun anggaran 2008 terjadi *overfinancing* yang tidak cukup signifikan. Namun jika dilihat dari objek belanja terdapat ketidakwajaran pengalokasian anggaran biaya pada rincian belanja dari beberapa kegiatan di setiap satuan kerja perangkat daerah. Komponen belanja yang dimaksud adalah belanja honorarium non PNS, belanja material, belanja makanan dan minuman, dan belanja perjalanan dinas. Seluruh rincian belanja tersebut ditemukan adanya inefisiensi alokasi anggaran, penetapan volume beban kerja yang tidak efektif, serta adanya alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan penetapan standar harga (Narulita, 2009)

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian dilakukan pemerintah daerah kabupaten Wajo. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2017 dari keseluruhan SKPD pada pemerintah daerah kabupaten Wajo, data Realisasi Anggaran 2017, serta data Standar Satuan Harga berdasarkan peraturan Bupati. Metode pengumpulan data diperoleh melalui observasi secara langsung untuk memperoleh informasi tentang penyusunan anggaran belanja pada masing-masing SKPD dan bagaimana bagian keuangan mendapat laporan dari seluruh SKPD secara tepat waktu, melalui wawancara pada bagian perencanaan dan keuangan untuk memperoleh keterangan tentang penentuan anggaran yang ada dalam dokumen RKA dan DPA, melalui Focus Group Discussion (FGD) untuk penentuan kegiatan dan pemicu aktivitas, dan melalui dokumentasi yaitu dengan memperoleh data sekunder RKA/DPA, Realisasi Anggaran dan Standar Satuan Harga.

Penyusunan analisis standar belanja dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu tahap pengumpulan data, tahap penyetaraan kegiatan, dan tahap pembentukan model. Pada tahap pengumpulan data, kegiatan dari semua data SKPD harus dikumpulkan secara bersama untuk memperoleh gambaran awal atas berbagai jenis kegiatan yang terjadi pada pemerintah daerah. Semua data (populasi) SKPD harus dilibatkan semuanya sehingga dapat memenuhi kerangka konseptual penyusunan ASB yaitu asumsi demokrasi. Data yang dikumpulkan pada tahap ini adalah DPA.

Tahap kedua merupakan tahap penyetaraan kegiatan dilakukan untuk menggolongkan daftar berbagai kegiatan yang diperoleh dari tahap pengumpulan data ke dalam jenis atau kategori kegiatan yang memiliki kemiripan pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan. Artinya, kegiatan yang bobot pekerjaannya sama maka

akan dikelompokkan pada golongan atau kelompok yang sama. Tahapan ini dilakukan untuk memenuhi kerangka konseptual yang pertama, yaitu penyusunan ASB harus berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja.

Tahap ketiga merupakan tahap pembentukan model, model yang dibentuk untuk memperoleh gambaran nilai belanja dan alokasi yang terjadi di pemerintah daerah. Strategi kegiatan penelitian ini tergambar dari ketiga mekanisme tahapan pembentukan model analisis standar.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusunan ASB melalui beberapa tahap, tahapan pertama dimulai dengan mengumpulkan data sekunder Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD tahun anggaran 2017 dan Data Realisasi Anggaran 2017 berupa kegiatan eksisting pemerintah daerah yang disesuaikan dengan data kegiatan Permendagri No. 13 Tahun 2006. Data DPA dan data realisasi anggaran diperoleh dari keseluruhan SKPD sejumlah 53 (lima puluh tiga) SKPD yang terdiri dari 29 dinas, 7 badan, 2 sekretariat, 1 inspektorat, dan 14 kecamatan. Dari 53 SKPD diidentifikasi setiap kegiatan tentang input dan outputnya. Selanjutnya menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dibuatkan Analisis Standar Belanja (ASB) yaitu beberapa kegiatan yang terbanyak dianggarkan oleh SKPD dengan input kegiatan yang jelas dan terukur. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan penyusunan laporan. Kegiatan penyusunan laporan model ASB disesuaikan dengan adanya kebijakan pemerintah daerah yaitu dalam menghilangkan belanja honor PNS yang sebelumnya dianggarkan dalam DPA 2017.

Masing-masing kegiatan tersebut dikelompokkan dan dikumpulkan dalam kegiatan yang sama atau sejenis yang diselenggarakan di tahun anggaran berjalan 2017 yang memiliki kesamaan output dan cost drivernya menjadi satu kelompok ASB, lalu diberikan penamaan kelompok ASB tersebut. Adapun tahap penyusunan ASB sebagai berikut:

#### Tahap pembentukan model

Pada tahap pembentukan model ASB meliputi penentuan nilai belanja tetap, belanja variabel, dan penentuan pengendali belanja dari tiap-tiap jenis kegiatan dengan menggunakan regresi linear dan bantuan aplikasi SPSS. Setelah itu dilakukan perhitungan batas minimum belanja, batas maksimum belanja, perhitungan rata-rata belanja, dan persentase perhitungan alokasi. Hubungan antara SKPD, Kegiatan, Anggaran, dan Pengendali Belanja pada Kegiatan penyusunan laporan. Berdasarkan data anggaran belanja dan pengendali belanja, maka dibuat suatu model pengujian koefisien regresi kegiatan penyusunan laporan. Hasil pengujian regresi linear kegiatan penyusunan laporan keuangan menunjukkan nilai R Square sebesar 0,51 atau 51% dengan Sig = 0,001. Secara statistik angka ini menunjukkan hasil yang baik karena nilai signifikansi yang disyaratkan lebih kecil dari 5%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah dokumen dan orang (*cost driver*) yang merupakan variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu total anggaran. Hal ini berarti jika terjadi kenaikan jumlah dokumen dan orang maka berpengaruh terhadap kenaikan anggaran.

Pembentukan model analisis standar belanja didasarkan pada hasil regresi dengan membentuk rumusan formula ASB yaitu terdiri dari belanja total, belanja tetap, belanja variabel dan *cost driver* (Jumlah dokumen dan jumlah orang). Model ASB penyusunan laporan yang telah terbentuk dapat digunakan untuk menentukan belanja rata-rata yaitu sebesar Rp 12.620.594,- Atas dasar hasil perhitungan besaran belanja rata-rata, maka dapat ditentukan nilai batas belanja minimum dan batas belanja maksimum masing-masing sebesar Rp 0,- untuk belanja minimum dan Rp 30.432.350,- untuk belanja maksimum. Nilai batas belanja minimum dan belanja maksimum dapat digunakan sebagai acuan dalam menilai kewajaran dari anggaran yang diajukan setiap SKPD, dan dapat juga digunakan sebagai acuan dalam penentuan realisasi anggaran.

Tahapan selanjutnya adalah perhitungan persentase alokasi, baik untuk alokasi rata-rata, alokasi batas atas, dan alokasi batas bawah. Alokasi merupakan proporsi sebuah obyek belanja dalam suatu kegiatan. Rata-rata adalah proporsi rata-rata dari obyek belanja tersebut untuk seluruh SKPD di Pemerintah Kabupaten Wajo. Batas bawah adalah proporsi terendah dari obyek yang bersangkutan sedangkan batas atas adalah proporsi tertinggi dari obyek tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan dalam tabel pendokumentasian/pembentukan ASB, ditemukan bahwa belanja makanan dan minuman memiliki alokasi belanja tertinggi sebesar 113,80%. Hal ini disebabkan karena sebagian besar kegiatan penyusunan laporan mengganggu obyek belanja ini dengan jumlah yang cukup tinggi. Untuk alokasi batas bawah, semua obyek belanja memiliki presentase alokasi batas bawah sebesar 0%. Hal ini berarti obyek belanja tersebut

tidak bisa dianggarkan apabila dibutuhkan dalam kegiatan penyusunan laporan. Obyek belanja dengan alokasi rata-rata terendah adalah Belanja lembur non PNS sebesar 7,79%, hal ini karena tidak semua kegiatan menganggarkan obyek belanja ini. Model ASB Penyusunan Laporan tanpa belanja honor dan lembur PNS menunjukkan perubahan alokasi proporsi batas bawah, rata-rata, dan batas atas rincian objek belanja kegiatan penyusunan laporan sebelum honor dan lembur tidak dianggarkan lagi, hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah kabupaten Wajo.

Pendokumentasian/pembentukan ASB merupakan tahapan akhir dalam penyusunan ASB. Tahapan ini mendesain format ASB agar dapat memberikan pengendali/pemicu belanja sekaligus memberikan fleksibilitas kepada penggunaannya. Pengendali belanja ditunjukkan dengan adanya rumusan formula untuk menentukan pagu total belanja suatu kegiatan berdasarkan target kinerja tertentu dan jumlah macam obyek belanja yang diperkenankan. Adapun fleksibilitas ditunjukkan dengan adanya batas atas dan batas bawah dalam menentukan besaran obyek belanja. Model ASB untuk Kegiatan Penyusunan Laporan ditunjukkan Tabel ASB-02 Penyusunan Laporan.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Amaliah (2015) dengan judul Model Analisis Standar Belanja (ASB) dan Kewajaran Anggaran di Pemerintah Kabupaten Bulukumba, menunjukkan hasil bahwa model ASB kegiatan sosialisasi/penyuluhan/pelatihan yang dihasilkan adalah  $Y = 8.637.625,793 + 202.423,465X$ , Model ASB kegiatan penyusunan pelaporan SKPD yang dihasilkan adalah  $Y = 3.259.976,529 + 7.330.594,92X$ , model ASB kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan yang dihasilkan adalah  $Y = 1.323.155,218 + 14.346.823,36X$ , dari 143 kegiatan untuk 3 (tiga) kelompok ASB hanya 8 (delapan) kegiatan yang *overfinance* (5,56%) dan 1 (satu) kegiatan yang *underfinance* (0,69%). Selebihnya 134 kegiatan (93,75%) anggarannya wajar. Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Putra (2012) dengan judul Evaluasi Penganggaran Keuangan Daerah dengan Analisis Standar Belanja (ASB) Tahun Anggaran 2010 (Studi Kasus: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi). Hasil penelitian menunjukkan ASB untuk anggaran belanja kegiatan forum komunikasi atau koordinasi Bappeda Kabupaten Ngawi adalah  $Y = 9.417.170,19 + 203.298,09X$ . Berdasarkan persentase alokasi belanja diketahui bahwa terdapat 40% kegiatan yang pelaksanaan anggaran keuangannya dalam kondisi *underfinance*, 20% dalam kondisi wajar, dan 40% dalam kondisi *overfinance*. Putra (2012) dalam penelitiannya mengenai Evaluasi Penganggaran Keuangan Daerah dengan Analisis Standar Belanja Tahun anggaran 2010 (studi kasus: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Ngawi) menghasilkan model regresi linier sederhana dengan ASB, menghitung nilai minimum dan maksimum anggaran belanja, serta menghitung prosentase alokasi belanja pada masing-masing objek belanja. Berdasarkan prosentase alokasi belanja diketahui bahwa kegiatan koordinasi di Badan Perencanaan Pembangunan kabupaten Ngawi, diketahui 40% pelaksanaan anggaran keuangannya dalam kondisi *underfinance*, 20% wajar dan 40% *overfinance*.

## MODEL ASB PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

### ASB-02

#### Deskripsi ASB

Kegiatan Penyusunan Laporan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah laporan atau dokumen (seperti Renja SKPD, Lakip SKPD, Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Keuangan Akhir Tahun, Laporan Capaian Kinerja SKPD dan laporan lainnya) yang dilaksanakan secara rutin dan berkala untuk kepentingan SKPD.

#### Pengendali belanja (*cost driver*)

Jumlah Dokumen dan Jumlah Orang.

Satuan Pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 985.770,649 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 316.929,96 per dokumen per orang

#### Rumusan ASB ( $Y = a + b1X1$ )

Belanja Tetap + Belanja Variabel

**Rp 985.770,649 + (Rp 316.929,96 x jumlah dokumen x jumlah orang)**

#### Rentang Relevan:

Jumlah dokumen antara 1 sampai 4

Jumlah Orang dalam tim antara 4 sampai 12

#### Alokasi Obyek Belanja ASB-02

Rincian Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honor Non PNS	0	27,11	95,40
Lembur Non PNS	0	7,79	56,82
Belanja Barang Habis Pakai	0	22,43	79,03
Belanja Cetak dan Penggandaan	0	15,94	47,81
Belanja Makanan dan Minuman	0	26,73	113,80

#### Cara pengembangan dan penggunaan model ASB adalah sebagai berikut:

1. Menemukan model ASB yang sesuai dengan rencana kegiatan yang akan disusun. Kesesuaian model ASB dengan rencana kegiatan dapat diketahui dengan mempelajari deskripsi ASB. Contoh : akan dilakukan perhitungan anggaran untuk kegiatan Laporan capaian Kinerja SKPD Dinas Kesehatan, dokumen dan jumlah orang yang terlibat dalam tim masing-masing sebanyak 2dokumen dan 10 orang. Dari daftar ASB dapat diketahui bahwa kegiatan tersebut masuk dalam kelompok ASB-02 PENYUSUNAN LAPORAN.
2. Menentukan maksimum total belanja untuk kegiatan tersebut berdasarkan rumus yang ada. Dengan menggunakan model ASB di atas, maka total belanja akan dihitung sebagai berikut : **Rp 985.770,649 + (Rp 316.929,96 x jumlah dokumen x jumlah orang)**. Dari rumus tersebut, maka total belanja adalah **Rp 985.770,649 + (Rp 316.929,96 x 4 x 10) = Rp 13.662.969,04**
3. Mengalokasikan total belanja tersebut ke dalam komponen-komponen belanjanya sesuai dengan prosentase yang telah ditentukan dalam standar. Misalnya, perencana memutuskan untuk menggunakan besaran rata-rata untuk menentukan besaran tiap-tiap objek belanjanya, maka distribusi belanjanya adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honor Non PNS	0	27,11	95,40
Lembur Non PNS	0	7,79	56,82
Belanja Barang Habis Pakai	0	22,43	79,03
Belanja Cetak dan Penggandaan	0	15,94	47,81
Belanja Makanan dan Minuman	0	26,73	113,80

4. Memindahkan hasil nomor 3 di atas ke formulir RKA-SKPD. Pada langkah keempat di atas distribusi belanja baru samai pada level objek belanja. Sementara itu, di dalam RKA objek-objek belanja tersebut dijabarkan lagi kedalam rincian objek belanja. Penjabaran objek belanja ke rincian objek belanja merupakan kebijakan masing-masing pengguna anggaran SKPD disesuaikan dengan kebutuhan kebijakan tersebut.
  - a. Untuk pengisian kolom indikator, dan tolok ukur kinerja, ASB dapat memberikan ukuran yang terukur untuk dua indikator kinerja, yaitu indikator masukan dan indikator keluaran. Teknis pengisian kedua indikator tersebut adalah sebagai berikut :
  - b. Mengisi kolom indikator masukan dengan tolok ukur kinerjanya dengan “jumlah dana yang tersedia” dengan target kinerja sebesar pagu ASB, dalam contoh di atas adalah **Rp 13.662.969,04**.
  - c. Mengisi kolom indikator keluaran istilah tolo ukur kinerjanya sesuai dengan *cost driver* yang terdapat dalam ASB, dalam contoh di atas adalah Jumlah Hari dan Jumlah Peserta. Selanjutnya mengisi target kinerja sesuai dengan target yang akan dicapai, dalam contoh di atas adalah 3 Hari 40 Peserta.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut: Model ASB untuk kegiatan penyusunan laporan adalah  **$Y = \text{Rp } 985.770,649 + (\text{Rp } 316.929,96 \times \text{jumlah dokumen} \times \text{jumlah orang})$** . Adapun masing-masing jumlah belanja rata-rata, belanja maksimum, dan belanja minimum untuk kegiatan ini adalah Rp12.620.594, Rp 30.432.350, dan Rp 0,-. Model analisis standar

belanja berfungsi sama seperti dokumen penganggaran yang digunakan Pemda dalam penyusunan anggaran yaitu dokumen SPM, KUA, PPAS, dan Standar Satuan Harga. ASB juga merupakan salah satu syarat dari indikator penerapan anggaran berbasis kinerja agar kegiatan yang terlaksana diyakini berjalan efektif, efisien dan ekonomis.

Bagi pemerintah kabupaten Wajo, sebaiknya menggunakan analisis standar belanja dalam proses penganggaran untuk menilai tingkat kewajaran besaran anggaran, hal ini diperlukan untuk menghindari kemungkinan *overfinance* yang dapat membebani anggaran maupun *underfinance* yang dapat menyebabkan kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat berjalan maksimal karena kurangnya anggaran.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, A.N. 2015. Model Analisis Standar Belanja (ASB) dan Kewajaran Anggaran di Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Tesis. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Fadilah, Sri. 2009. "Activity Based Costing (ABC) sebagai Pendekatan Baru Untuk Menghitung Analisis Standar Belanja (ASB) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)". *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 2(1), Hal 54-78.
- Fatikhah, D.N. 2012. Kajian Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Batu. Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
- Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI
- Murtin, Alek. 2013. Optimalisasi Peran Analisis Standar Belanja dalam Penyusunan Anggaran Belanja SKPD di Kabupaten Lingga. Makalah Seminar. Kabupaten Lingga: Pemda Kabupaten Lingga.
- Narulita, Sari. 2011. Penerapan Konsep Analisa Standar Belanja pada Penyusunan Anggaran Kegiatan Bimbingan Teknis di Kabupaten Kuningan. Tesis. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
- Oktaria, Benny. 2012. Analisis Kendala-Kendala Penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) (Studi Kasus pada Kabupaten Katingan – Kalimantan Tengah). Tesis. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2006. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Putra, Rahadiyan Prasana. 2012. Evaluasi Penganggaran Keuangan Daerah dengan Analisis Standar Belanja (ASB) Tahun Anggaran 2010. Tesis pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelag Maret: Tidak diterbitkan
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. Analisis Standar Belanja: Konsep, Metode Pengembangan, dan Implementasi di Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Suwitoadi, Achyuni. 2016. Implementasi ASB pada Penganggaran Daerah (RKA-SKPD). Materi Pelatihan Penganggaran Berbasis Value for Money (Kinerja). Yogyakarta: Program Magister Ekonomika Pembangunan FEB UGM.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Yanse, Kardias. 2016. Konsep dan Implementasi Analisis Standar Belanja (ASB) dalam Perencanaan Anggaran Daerah. Materi Pelatihan Penganggaran Berbasis Value for Money (Kinerja). Yogyakarta: Program Magister Ekonomika Pembangunan FEB UGM.